

**PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH, SUMBER DAYA MANUSIA,  
DAN PEMANFATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP  
KETEPATWAKTUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(STUDI EMPIRIS PADA SKPD PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL)**

**Muhamad Azis Anshori**

Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Email: [aziestf8@gmail.com](mailto:aziestf8@gmail.com)

**Abstrak**

*The purpose of this study is to determine the influence of regional financial supervision, human resources and utilization of information technology to the timeliness of local government financial reporting. The data used in this study is the primary data obtained from the distribution of questionnaires to respondents. Population in this research is part of accounting / administration finance at SKPD in Bantul regency, the sample taken is 21 SKPD. Sampling technique using purposive sampling. The method of analysis used in this study is multiple linear regression analysis. The result of the research shows that the supervision of regional finance and the utilization of information technology has significant influence on the timeliness of local government financial reporting, while the human resource variable does not affect the timeliness of regional government financial reporting.*

**Keywords:** *Regional Financial Supervision, Human Resources, Utilization of Information Technology, and Timeliness*

**PENDAHULUAN**

Otonomi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. *Good governance* sering dikaitkan sebagai pemerintahan yang baik atau sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran dari salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002).

Sesuai undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dalam rangka menyelenggarakan *good goveranment* pemerintah dituntut untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dapat diwujudkan dengan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tersebut tetapi juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas mengaplikasikan serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut (Halim, 2012).

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan taransaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan sektor publik

merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan semakin besar terhadap pelaksanaan akuntansi sektor publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. perkembangan akuntansi sektor publik yang semakin pesat menimbulkan tuntutan yang lebih besar terkait dengan dilaksanakannya transparan dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik (Mardiasmo 2005).

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Dimendi akuntabilitas publik salah satunya adalah akuntabilitas finansial, dalam menegakan akuntabilitas finansial pemerintah daerah memiliki tanggungjawab mempublikasikan hasil laporan keuangan daerah kepada *stakeholder* secara andal dan tepatwaktu (Indriasari dan Nahartyo, 2008).

Adapun fenomena yang terjadi di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bantul ditemukan keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangannya yang seharusnya dicatat pada tahun 2013 tetapi dimasukan pada periode tahun anggaran 2014, serta belum membuat laporan keuangan secara benar. Tytut Ratih Kusumo sebagai kepala perwakilan BPKP DIY menyampaikan kepada Bupati agar mendorong SKPD untuk menyusun neraca laporan keuangan bulanan secara tepat waktu dan segera memperbaiki laporan sesuai saran BPKP dan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ([www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)).

Jumat 31 Maret 2017 Bupati Bantul, Drs Suharsono dengan didampingi oleh Sekretariat daerah dan beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Pemerintah Kabupaten Bantul tahun Anggaran 2016 kepada BPK perwakilan provinsi DIY. Penyerahan LKPD unaudited tahun 2016 ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat Undang-undang nomer 1 tahun 2004 pasal 56 ayat (3) "LKPD disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir". Penyerahan ini merupakan wujud komitmen dan juga bentuk ikrar bahwa laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah siap untuk dilakukan penilaian (pemeriksaan) oleh BPK. "BPK DIY akan segera memeriksa LKPD tersebut, sehingga diharapkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD dapat disampaikan kepada DPRD 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah ini". Hal tersebut merujuk pada pasal 17 Undang-undang nomer 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (BKAD Bantul).

Terkait dengan fenomena yang terjadi yang terjadi dan banyak topik yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, Penelitian ini replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Sembiring (2013:1) yang meneliti tentang Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini ditambahkan variabel pengawasan keuangan daerah, variabel tersebut diambil dari penelitian yang dilakukan oleh (Fajrin, 2014:1) yang meneliti tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah. Dalam penelitian ini juga menggunakan populasi, sampel dan waktu penelitian yang berbeda. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Kabupaten Bantul Yogyakarta.

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Teori Kepatuhan**

Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai salah satu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku (Septiani, 2005 dalam Zuliarti, 2012:30).

### **Peraturan Pemerintah Daerah**

Definisi tentang Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Pasal 136 ayat (2) Undang-undang No. 32/2004 mengamanatkan bahwa Perda dibentuk oleh Pemerintah daerah dan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembentukan; serta ayat (3) Perda dan dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Dasar Hukum: (1) Undang Undang dasar 1945, (2) Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (3) Undang-Undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan (4) Peraturan Pemerintah Nomer 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

### **Pelaporan Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2010 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengertian pelaporan keuangan adalah sebagai berikut: "Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara/Daerah selama satu periode" (PP No. 8 Tahun 2006).

### **Ketepatanwaktuan**

Ketepatanwaktuan merupakan salah satu dalam karakteristik nilai informasi yang harus dipenuhi agar laporan keuangan yang disajikan relevan dalam pembuatan laporan keuangan (Suwardjono, 2005). Penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu merupakan hal yang paling penting dalam pemerintahan. Apabila informasi tersedia dalam waktu yang lama, maka informasi tersebut tidak mempunyai nilai lagi dikarenakan ketepatanwaktuan itu informasi tersedia tepat waktu bagi pengambilan keputusan sebelum mereka kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang diambil.

### **Pengawasan keuangan Daerah**

Menurut Yosa (2010) dalam Arfianti (2010:29) yang dimaksud pengawasan keuangan daerah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintah.

### **Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan dengan bekal pengalaman, pendidikan, dan pelatihan (Widodo dalam Kharis, 2010). Dalam mewujudkan kualitas informasi pelaporan keuangan yang baik, maka diperlukan sumber daya manusia dalam memahami akuntansi berdampak kesalahan laporan keuangan yang dibuat karena tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah sehingga laporan keuangan tidak dapat disampaikan secara tepat waktu karena terdapat hambatan dalam pengelolaan keuangan sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama agar laporan keuangan dapat diandalkan.

### **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Menurut Suyanto, (2005:10) Teknologi informasi merupakan sebuah bentuk umum yang menggambarkan setiap teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyampaikan informasi. Pemanfaatan penerapan teknologi informasi tidak hanya pada sektor bisnis, tetapi juga pada sektor publik khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mutlak harus diutuhkan. Sebagai contoh pengajuan perijinan, pembuatan kartu tanda penduduk, pembuatan surat ini mengemudi (SIM), maupun informasi profil daerah. Seperti halnya perusahaan, pemerintah menghadapi masalah dalam penerapan teknologi informasi (TI).

### **Perkembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengawasan pemerintah daerah ditunjukan untuk menjamin bahwa pemerintah sudah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kurangnya pengawasan yang dilakukan menyebabkan buruknya dalam pembuatan laporan keuangan daerah, sehingga kurang tertibnya dalam penyusunan laporan keuangan, pencatatan transaksi yang kurang akurat, dan tidak tepat waktu.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fikri (2011) dan Fajrin (2014:14) menunjukan bahwa pengawasan keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap nilai informasi dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah. Artinya semakin baik pengawasan keuangan daerah akan memberikan pengaruh yang baik terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Sehingga instansi pemerintah mampu menyediakan laporan keuangan yang baik dan tersedianya informasi laporan keuangan saat dibutuhkan.

H<sub>1</sub>: pengaruh pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif pada ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

#### **Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pemahaman yang rendah terhadap tanggungjawab sebagai seorang pekerja tentunya akan berdampak pada penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum atau tidak memenuhi salah satu nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatanwaktuan (Ariesta, 2013:7). Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan cepat dan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu (Sembiring, 2013:7).

Hasil penelitian Winidyaningrum (2010) menyimpulkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah. Sejalan dengan Indriasari (2008), dan Mustofa (2010) yang menyatakan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Nihayah (2015:12) yang menyimpulkan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah.

Dari beberapa definisi dan teori mengenai sumber daya manusia terkait dengan ketepatanwaktuan dalam pelaporan keuangan, maka dapat dilihat bahwa sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah, semakin berkualitas sumber daya manusia, maka akan sangat membantu mempercepat penyajian laporan keuangan daerah sehingga laporan keuangan tersebut tepat waktu.

H<sub>2</sub>: pengaruh sumber daya manusia terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah

### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Sistem akuntansi di pemerintah sudah pasti memiliki transaksi yang kompleks. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatanwaktuan (Arista, 2013:8). Pemanfaatan teknologi informasi akan meminimalisasi berbagai kesalahan karena semua aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara lebih sistematis dan pada akhirnya akan mampu menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu (Nihayah, 2015).

Penelitian yang dilakukan Indriasari (2008), Rosalin *et al* (2011), dan Sembiring (2013:8) menunjukkan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Artinya pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatanwaktuan. Pemanfaatan teknologi informasi akan meminimalisasi berbagai kesalahan, karena semua aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara lebih sistematis dan pada akhirnya akan mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang andal dan tepat waktu.

H<sub>3</sub>: pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah

### **Definisi Operasional variabel**

#### **Variabel Dependen**

Ketepatanwaktuan pelaporan keuangan adalah pelaporan keuangan yang disajikan secara tepat waktu dan dapat menghasilkan Informasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan (PP No. 71/2010).

#### **Variabel Independen**

Pengawasan keuangan daerah merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan keuangan daerah pada dasarnya mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana, ketentuan dan peraturan perundang-undang yang berlaku (Baswir, 1999:129).

Menurut Indriasari dan Nurhartoyo (2008) Sumber Daya Manusia adalah kemampuan baik dalam tingkat individu, organisasi atau kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Menurut Hamzah (2009) dalam Windyaningrum dan Rahmawati (2010), pemanfaatan teknologi informasi mencakup: pengoahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja elektronik, dan pemanfaatan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat diseluruh wilayah.

## POPULASI, SAMPEL, DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bantul. Sampe yang akan diambil untuk diteliti adalah sebagian SKPD yang berada di Kabupaten Bantul yang berjumlah 21 SKPD, terdiri dari Kantor, Badan, dan Dinas dimana setiap SKPD akan diwakili oleh beberapa responden. Responden dalam penelitian ini adalah yang menjalankan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini terhadap responden dilakukan dengan metode *purposive sampling*.

## Teknik Analisis Data

Penelitian ini diawali dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari kuesioner kemudian diolah menggunakan SPSS v 16.0 kemudian dilanjutkan dengan menguji validitas dan reliabilitas untuk pengujian terhadap instrumen penelitian. Hal ini dimaksudkan agar data yang akan dimasukkan dalam model regresi telah memenuhi syarat-syarat regresi. Asumsi yang harus dipenuhi adalah asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas. Data kemudian dianalisis dengan regresi linier berganda yang dinyatakan dalam persamaan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Ketepatanwaktuan
- $\alpha$  : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisien regresi
- $X_1$  : Pengawasan Keuangan Daerah
- $X_2$  : Sumber Daya Manusia
- $X_3$  : Pemanfaatan Teknologi Informasi
- $e$  : Error term

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Simultan F  
ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	107.741	3	35.914	22.126	.000 <sup>a</sup>
	Residual	115.245	71	1.623		
	Total	222.987	74			

a. predictors: (Constant), PTI, PKD, SDM

b. Dependent Variable: KW

Sumber: Data dioah 2018

Berdasarkan dari hasil output komputer melalui SPSS seperti terlihat pada tabel tersebut, maka diperoleh nilai F-hitung dalam penelitian ini sebesar 22,126 yang lebih besar dari F-tabel yaitu 2,73.

### Hasil Hasil Uji Koefisien Determasi (R<sup>2</sup>)

<i>Model Summary</i>				
<b>Model</b>	<b>R</b>	<b>R Square</b>	<b>Adjusted R Square</b>	<b>Std. Error of the Estimate</b>
1	.695 <sup>a</sup>	.483	.461	1.274

a. predictors: (Constant), PTI, PKD, SDM

b. Dependent Variable: KW

Sumber: Data diolah 2018

Untuk pengaruh secara simultan dapat dilakukan dengan melihat nilai R<sup>2</sup>. Dari hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,461 atau 46,1%.

### Hasil Uji Parsial (Uji t)

<i>Coefficients<sup>a</sup></i>					
		<i>Unstandarized Coefficients</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Standardized Coefficients</i>	
<b>Model</b>		<b>B</b>		<b>Beta</b>	<b>t</b>
1	(Constant)	5.674	1.971		2.879
	Pengawasan Keuangan Daerah	.197	.076	.262	2.605
	Sumber Daya Manusia	.027	.042	.068	.646
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	220	.052	.479	4.242

a. Dependent Variabel: KW

Sumber: Data diolah 2018

Berdasarkan dari hasil output komputer melalui SPSS seperti terlihat pada tabel tersebut, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 5.674 + 0,197 X_1 + 0,027 X_2 + 0,052X_3 + e$$

### H<sub>1</sub>: Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah

Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah. Hasil uji hipotesis 1 menyimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan hasil t-hitung 2,605 lebih besar dari nilai t-tabel 1,99394 dan tingkat signifikansi sebesar 0,011. Berdasarkan hasil tersebut, maka H<sub>1</sub> terdukung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika suatu instansi pemerintah melaksanakan pengawasan keuangan yang baik, maka semakin baik pengawasan keuangan daerah akan memberikan pengaruh yang baik terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bantul. Pengawasan keuangan daerah ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Fazrin (2014:13), Trisaputra (2010:17), Fikri (2011), dan Armando (2013) yang mengatakan bahwa

pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah.

H<sub>2</sub>: sumber daya manusia daerah terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah

Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian hipotesis 2 adalah nilai *t* hitung sebesar 0,646 yang lebih kecil dari *t*-tabel yaitu 1,99394 dengan tingkat signifikansi 0,520. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan hasil *t*-hitung sebesar 0,646 lebih kecil dari nilai *t*-tabel 1,99394 dan tingkat signifikansi sebesar 0,520. Hal ini menunjukkan bahwa, sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil tersebut maka H<sub>2</sub> tidak terdukung.

Sumber daya yang tidak memadai dalam menyusun laporan keuangan menyebabkan proses penyusunan laporan keuangan terganggu sehingga laporan keuangan tidak dapat dihasilkan secara tepat waktu. Zuliarti (2012:91) yang mengatakan bahwa ketidaksignifikan ini mungkin disebabkan kondisi sumber daya manusia di subbagian akuntansi atau tata usaha yang belum mendukung baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualifikasi, sebagian besar pegawai subbagian akuntansi atau tata usaha tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Uraian tugas dan fungsi subbagian akuntansi atau tata usaha keuangan yang ada juga masih belum umum (belum terspesifikasi dengan jelas). Dari sisi kuantitas, masih sangat sedikit jumlah akuntan atau pegawai yang berpendidikan tinggi akuntansi, sementara peraturan perundang-undangan telah mewajibkan setiap satuan kerja untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan, maka pegawai yang ada diberdayakan.

Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marupi (2016), dan Zuliarti (2012:91), yang menemukan bahwa sumber daya manusia dan perangkat pendukung tidak signifikan mempengaruhi keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomer 24 tahun 2005. Temuan ini sejalan dengan penelitian Faristiana (2011) yang menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah.

H<sub>3</sub>: pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah

Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil hipotesis 3 menyimpulkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai *t*-hitung sebesar 4,242 lebih besar dari nilai *t*-tabel 1,99394 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Berdasarkan hasil tersebut, maka H<sub>3</sub> terdukung.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi akan memberikan pengaruh yang baik terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah. pemanfaatan teknologi informasi meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan di satuan kerja perangkat daerah, sehingga dapat mempercepat proses pengolahan data transaksi, serta menghasilkan *output* lainnya tepat waktu. Menurut Zuliarti (2012:92) temuan ini mendukung literatur-literatur yang berkaitan dengan manfaat dari suatu teknologi informasi dalam suatu organisasi, bagi pemerintah daerah yang harus mengelola APBD dimana volume transaksinya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan semakin kompleks.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2013:8), Ariesta (2013:13), dan Winidyaningrum (2010) yang mengatakan bahwa



pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian pengaruh pengawasan keuangan daerah, sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut: Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Pengawasan Keuangan Daerah, maka akan memberikan pengaruh yang baik terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sehingga instansi pemerintah mampu menyediakan laporan keuangan yang baik dan tersedianya informasi laporan keuangan saat dibutuhkan. Sumber Daya Manusia tidak mempunyai pengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Daerah. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang tidak memadai dalam menyusun laporan keuangan menyebabkan proses penyusunan laporan keuangan terganggu sehingga laporan keuangan tidak dapat dihasilkan secara tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi sumber daya manusia di subbagian akuntansi atau tata usaha yang ada di Kabupaten Bantul belum didukung baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Ketika seorang pegawai memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan fungsinya serta hambatan di dalam pengolahan data juga dapat berdampak pada keterlambatan penyelesaian laporan keuangan, pada sisi lain seorang pegawai memiliki pemahaman yang tinggi terhadap tugas dan fungsinya akan menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya dengan baik dan lebih cepat. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasinya yaitu ketepatan waktu. Dimana semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik.

### **Implikasi**

Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar atau bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. dengan memperhatikan dan meningkatkan pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi yang memadai, diharapkan pemerintah daerah yang terlibat langsung secara teknis dalam pencatatan transaksi keuangan pemerintah daerah dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan dapat meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

### **Keterbatasan**

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih mempunyai beberapa keterbatasan yang meliputi:

1. Kurangnya keseriusan dan kepedulian dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Masalah tersebut dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban responden.

2. Waktu penelitian relatif singkat, sehingga jumlah sampel yang diterima masih jauh dari yang diharapkan oleh peneliti.
3. Peneliti sulit untuk mendapatkan jaminan bahwa semua responden akan mengembalikan kuesioner yang dibagikan, kuesioner yang diberikan menunggu keputusan dari kepala SKPD terlebih dahulu sehingga membutuhkan waktu 7-14 hari kerja.

#### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak:

1. Melengkapi metode survei dengan wawancara untuk meningkatkan sikap kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada.
2. Bagi instansi pemerintah disarankan kepada setiap SKPD Kabupaten Bantul agar bisa meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki baik pada tingkat sistem, kelembagaan, maupun individu.
3. Pada penelitian berikutnya supaya dapat memperluas pengambilan sampel penelitian. Karena pada penelitian ini hanya meneliti di SKPD Kabupaten Bantul. Sehingga bagi peneliti berikutnya dapat memperluas sampel dan mengambil sampel di Pemerintah daerah lain.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andri, Wiwik. 2010 Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kab.Pesisir Selatan). Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol 5, No.1.
- Andriyani, Ika. 2016. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa Kabupaten Klaten. Skripsi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.
- Andry. 2013. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). Universitas Negeri Padang).
- Arfianti, Dita. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Diponegoro Semarang.
- Fajrin, Ferawati. (2014) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Kabupaten Padang Pariaman). Universitas Negeri Padang
- Haza, Ikwanu. 2013. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang. Jurnal, Vol. 2. No. 1.
- Husen, Idham. 2017. Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP Berbasis Akrua, Sistem Informasi Manajemen Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Relevansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kantor Walikota Yogyakarta). Skripsi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
- Indriasari, D.& Nahartyo, E. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi

- Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Organ Ilir).
- Jurnali, T. & Supomo, B. 2002. Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas Teknologi dan Pemanfaatan TI Terhadap Kinerja Akuntan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Volume 5, No.2: pp.214-228.
- Mardiasmo, 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol. 2 No.1.
- Marinawati, 2018. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa, Skripsi. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.
- Nihayah, Anisatin. 2015. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian internal Terhadap Ketepatanwaktuan dan Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada DPPKAD Eks Karesidenan Pati). *Jurnal*, Universitas Muhammadiyah.
- , Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 2005. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- , Peraturan Pemerintah Nomer 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pusptaningsih, 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan SKPD. Republik Indonesia, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang pemerintahan Daerah.
- Riana, Ulul, 2017. Pengaruh Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Aksesibilitas, dan ketepatanwaktuan Penyajian Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Skripsi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.
- , Undang-undang No 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah.
- , Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Sari, Shinta Permata, dan Witono, Bayu. 2014. Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Daerah Ditinjau dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.
- Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta; Salemba Empat
- Sembiring, Febriady Leonard. 2013. Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang). Universitas Negeri Padang.
- Sukirman, Sularso, Nugraheni. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan dengan Pengendalian Intern Akuntansi Sebagai Variabel Pemoderasi. (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas). Universitas Jendra Sudirman.
- Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. Yogyakarta. BPFE
- Vidyasari, Tiara. 2012. Pengaruh Pemanfaatan teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Winidyaningrum, Celviana, dan Rahmawati. 2010. Pengaruh Sumberdaya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten). Simposium Nasiona Akuntansi XIII di Purwokerto.
- Zuliarti. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus). Universitas Muria Kudus.